

**DAMPAK PEMEKARAN PEKON TERHADAP PERCEPATAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**
(Studi di Pekon Bandar Jaya Kecamatan
Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

MHD ICHSANUDDIN
NPM: 1721020234



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2024 M

**DAMPAK PEMEKARAN PEKON TERHADAP PERCEPATAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**
(Studi di Pekon Bandar Jaya Kecamatan
Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh
MHD ICHSANUDDIN
NPM: 1721020234

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pemekaran desa di Pekon Bandar Jaya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, berdampak positif pada percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah tersebut. Pemekaran pekon dianggap penting untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat di pekon Bandar Jaya. Pemerataan pembangunan menjadi tujuan pemerintah karena dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan di masyarakat. Pelayanan masyarakat juga dianggap krusial, mencakup pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemekaran desa ini dilakukan pada tahun 2009, memisahkan pekon Bandar Jaya dari pekon induk Negeri Ratu, karena masyarakat ingin mengurus desanya sendiri. Keputusan pemekaran ini diambil karena pekon Bandar Jaya mengalami kekurangan pembangunan dan pelayanan selama puluhan tahun. Pekon Bandar Jaya saat itu memiliki luas wilayah 452 Ha, dua pemangku, yaitu pemangku Bandar Jaya dan Padang Dalam, serta jumlah penduduk sebanyak 673 jiwa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat?, dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat?. Sedangkan untuk Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah perangkat dan masyarakat pekon Bandar Jaya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik observasi, *interview* dan dokumentasi. Selanjutnya langkah yang digunakan dalam menganalisa data pertama reduksi data, selanjutnya display data, dan terakhir prefikasi data, dengan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa, Dampak pemekaran Pekon terhadap pembanguna infrastruktur di pekon Bandar jaya memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, pelayanan, dan potensi ekonomi. Kemudian Dengan demikian pemekaran pekon bandar jaya kecamatan ngaras dapat dikatakan berdampak positif terhadap pelayanan masyarakat di pekon bandar jaya, meskipun memang masih diperlukan

evaluasi lebih lanjut untuk memahami dan mengatasi perbedaan persepsi antara pihak yang menyelenggarakan layanan dan masyarakat terkait efektivitas dan ketepatan waktu dalam proses pelayanan dan nilai-nilai yang telah di terapkan sejalan dengan ajaran Islam, meskipun memang masih ada hal-hal yang perlu di evaluasi terutama terkait pelayanan masyarakat.

Kata kunci: Pemekaran pekon, percepatan pembanguna dan pelayayn masyarakat.



SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD ICHSANUDDIN
NPM : 1721020234
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 06 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



MHD Ichsanuddin
NPM. 1721020234



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : MHD ICHSANUDDIN
NPM : 1721020234
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Siyash (Studi di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)

MENYETUJUI

Telah di Munaqasyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP. 1960102/19911031002

Pembimbing II

Erik Rahman Gumiri, M.H
NIP. 199009152019031018

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Freni, M.Si
NIP. 1980031520090110117



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Siyash (Studi di Desa Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”** di susun oleh, **Mhd. Ichsanuddin, NPM. 1721020234**, program studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah di fakultas syar’iah UIN Raden Intan Lampung Pada hari: **Rabu, 27 Maret 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I.

Skretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H.

Penguji I : Frenki, M.Si.

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syar’iah



Dr. Fida Rochah Nur, M.H.

NPM. 146908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada
pada diri mereka sendiri.
(QS. ar-Ra'du (13):11).*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya, dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam, maka dengan rasa syukur serta tulus ikhlas disertai jerih payah dan perjuangan penulis alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

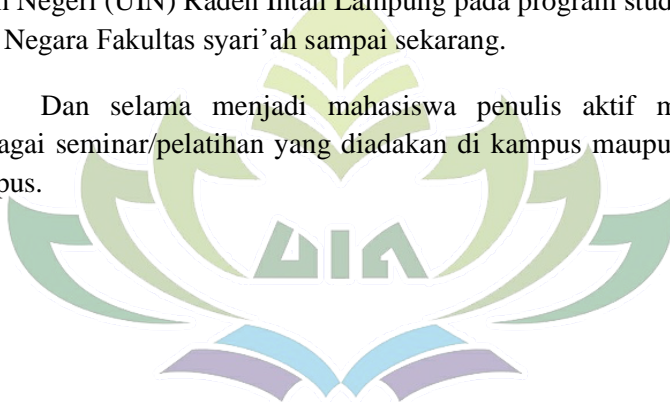
1. Kedua orang tua penulis yang sangat luar biasa yaitu ibu Yennizar dan Ayah Muhsin yang sangat penulis cintai. Terimakasih atas pengorbanan dan perjuangannya selama ini yang sudah membesarkanku, membimbingku, memberikanku semangat dengan penuh kasih sayang hingga sampai saat ini, dan senantiasa berdoa dalam setiap langkahku, tabah dan sabar demi kesuksesanku, karena berkat doa-doa yang kalian panjatkan anakmu ada di titik ini dan semua yang anakmu peroleh saat ini tidak luput dari perjuangan kalian juga dengan Izin Allah SWT. Maaf belum bisa kasih yang terbaik untuk mak dan Bapak. Semoga Mak dan Bapak selalu dalam Lindungan Allah SWT dan selalu memuliakan Mak dan bapak di dunia maupun di Akhirat. Aamiin
2. Saudara Kandung penulis, kakak Lisa Andriyani, serta adik Miftahul Muniroh dan Zahrotul aini, terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan kesuksesan penulis dalam menuntut ilmu.
3. Keluarga besar HNA yang selalu mensupport dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan sampai dengan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu penyusunan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mhd Ichsanuddin lahir di Negeri Ratu Ngaras, 12 November 1999, sebagai anak kedua buah cinta dari pasangan bapak Muhsin dan ibu Yennizar.

Pendidikan formal ditempuh pada tahun 2005 di SDN 29 kroi Kecamatan Ngaras kab. Pesisir barat dan lulus tahun 2011, pada tahun bersamaan melanjutkan pendidikan di MTs NU KRUI Pesisir barat hingga lulus pada tahun 2014, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan setingkat SMA di MAN 1 Pesisir barat dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas syari'ah sampai sekarang.

Dan selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti berbagai seminar/pelatihan yang diadakan di kampus maupun di luar kampus.



KATA PENGANTAR

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur,MH. selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I dan bapak Fathul Mu'in, M.H.I selaku ketua dan Sekretaris prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum, selaku pembimbing I yang selalu mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H, selaku pembimbing Akademik sekaligus pembimbing II yang selalu dengan tulus meluangkan waktu untuk bimbingan, mendengarkan keluhan kesah penulis, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Karyawan di Fakultas syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan Kepada penulis selama menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung.
7. Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi Buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan Teman-teman terbaik penulis terimakasih atas dukungannya selama ini, yang selalu memberi semangat, motivasi dan menemani setiap prosesnya, terima kasih banyak sudah menemani hingga sampai saat ini,
9. Temen-temen seperjuangan Hukum Tata Negara kelas A Terimakasih telah menjadi keluarga, yang selalu bersama dalam

proses belajar menuntut ilmu, yang menyaksikan perjuangan penulis hingga titik saat ini.

10. Almamaterku Tercinta yaitu UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia kehidupan, Khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum tata negara tempatku menuntut ilmu sampai detik ini

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu penulis mengucapkan terimakasih atas apa yang telah kalian berikan semoga menjadi amal sholeh dari Allah SwT dan skripsi ini bermanfaat bagi para akademisi dan pembaca.

Bandar Lampung,
Penulis

2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWATAR HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Siyash Syar'iyah.....	17
1. Definisi Siyash Syar'iyah.....	17
2. Pengertian Fiqh Siyash.....	19
3. Cakupan Fiqh Siyash.....	21
B. Pemekaran Pekon	26
1. Pengertian Pemekaran Pekon.....	26
2. Konsep Pemekaran Pekon.....	27
3. Kebijakan Pemekaran Pekon.....	29
4. Prosedur Pemekaran Pekon.....	30
C. Pelayanan Masyarakat	31
1. Pengertian Pelayanan Masyarakat.....	31

2.	Jenis-jenis Pelayanan Masyarakat	32
3.	Asas-asas Pelayanan Masyarakat	33
4.	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat.....	34
5.	Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat.....	37
6.	Standar Pelayanan Masyarakat.....	39
7.	Kualitas Pelayanan Masyarakat	40
D.	Pemerataan Pembangunan Daerah.....	41
1.	Pengertian Pemerataan Pembangunan Daerah	41
2.	Konsep Pemerataan Pembangunan Daerah	42

BAB III DESKRIPSI DATA LAPANGAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1.	Sejarah Pekon Bandar Jaya	49
2.	Letak Geografis Pekon Bandar Jaya	50
3.	Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	51
4.	Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Bandar Jaya	52
5.	Struktur Pekon Bandar Jaya	53
B.	Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.....	54
1.	Pembangunan Infrastruktur di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.....	56
2.	Pelayanan Masyarakat di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat	61
3.	Ketepatan Waktu Pelayanan.....	64
4.	Kelengkapan sarana dan prasarana.....	65

BAB IV ANALISIS DATA

A.	Analisis Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat	67
B.	Analisis Dampak Pemekaran Terhadap Pelayanan Masyarakat di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat di Tinjau dari Fikih Siyasah.....	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 73
B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Pekon Bandar Jaya.....	51
Tabel 3.2 Mata Pencaharian Penduduk Pekon Bandar Jaya	52
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Bandar Jaya	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur pemerintahan Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras	54
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “**Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Siyash (Studi di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**”. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam sebuah keputusan yang di ambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.¹

Pemekaran pekon adalah pemecahan desa lebih dari satu desa. Pemekaran pekon pada dasarnya, peroses pembagian wilayah menjadi satu atau lebih atas dasar prakarsa masyarakat untuk memperhatikan adat istiadat atau asal-usul ataupun sosial budaya masyarakat.²

Percepatan pembangunan adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tingkat pertumbuhan kecepatan.³ Upaya sadar yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah. menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses,

¹ Suharno dan Retnoningsuh, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya.243

² Haw. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2004).41

³ *Ibid*, 260

pembuatan pemerataan pembangunan bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pendapatan bagi warga negara kita.⁴

Pelayanan Masyarakat, menurut Bab I Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25/2009, yang dimaksud dengan pelayanan Masyarakat ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan admistratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan Masyarakat.⁵

Fiqh Siyash adalah adalah ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh siyash yaitu pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di ambil beberapa kesimpulan bahwa penelitian ini adalah Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarat di Tinjau dari Fiqh Siyash di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Pembentukan dan pembangunan Daerah Otonomi, Desa baru yang memisahkan diri dari desa yang lama untuk mengatur Desa sendiri agar tercapainya kemajuan dan kemakmuran secara merata.

B. Latar Belakang Masalah

Fiqh Siyash adalah adalah ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk

⁴ *Ibid.* 1147

⁵ Widya Kurniati Mohi, Irmanovika Mahmud, Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Ilmu Adaministerasi Publik*, Vol 6, NO 2, 2018.

⁶ Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-qur'an Dan Hadist, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol 6, No 2.

mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqih siyasah yaitu pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.⁷

Fiqih siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari siyasah idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan Masyarakat pemerintahan dan sebagainya, Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syari'ah. Sumber-sumber landasan dari siyasah idariyah adalah al_qur'an dan hadist serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya.⁸

Fiqih siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapat dan belanja Negara. Pada dasarnya, Siyasah Maliyah merujuk pada aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fiqih siyasah maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak melebur.⁹

Indonesia adalah negara yang bersifat majemuk (plural) dalam hal etnis, bahasa daerah, agama, budaya, geografis dan lain-lain. Dengan keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintahan sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Karena mengingat negara indonesia bukanlah sebuah negara yang kecil sehingga sangat sulit untuk pemerintahan menjangkau daerah satu persatu terutama untuk daerah-daerah terpencil. Untuk memudahkan pengaturan dan penataan pemerintahan, di perlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang

⁷ Wahyu Abdul Jafar, Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-qur'an Dan Hadist, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Iskam*, Vol 6, No 2. ss

⁸ Muhammad Abduh, *ushul al_Idariyah, Asy_Sayariyah*, (Bayt Ats_Tsafiqoh, 2003).7

⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), 64.

dapat berjalan secara efisien dan mandiri, serta dekat dengan rakyat sehingga saat ini telah terjadi pemekaran-pemekaran wilayah baru menjadi provinsi maupun kabupaten/kota/desa. Desa merupakan satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota. Akan tetapi, status desa tidak sama dengan kelurahan yang tidak mempunyai hak membenahi dan mengatur segala kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.¹⁰

Pemekaran pekon adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa. Pemekaran pekon dapat berupa penggabungan dua atau lebih desa menjadi satu desa atau pemecahan satu desa menjadi dua desa atau lebih. Namun di Indonesia yang lebih sering terjadi adalah pemecahan dari satu desa menjadi dua atau lebih, dengan berbagai faktor pendorong untuk melakukan pemecahan, yang paling sering terjadi adalah dengan alasan ingin menjadi desa yang mandiri dan menginginkan pelayanan masyarakat yang lebih memuaskan.¹¹

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin mempertegas posisi desa dalam pembangunan nasional. Secara garis besar Undang-undang desa mengatur materi mengenai Asas pengaturan, kedudukan, dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan desa dan Aset desa, Pembangunan desa dan Pembangunan kawasan perdesaan, Badan usaha desa, kerja sama desa, dan lembaga Adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus untuk desa adat. Pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah,

¹⁰ A.Tabrani Rusyan. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 1

¹¹ Aw.Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) 41

pertahanan keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.¹²

Tujuan dilakukannya pemekaran desa adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah serta pemerataan pembangunan. Dalam Inu Kencana Syafii, Azhari, sistem politik Indonesia, pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pemekaran pekon dapat terwujud.

Pemekaran pekon secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Setelah berjalan kurang lebih lima tahun, banyak pihak ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak, meski saat ini pemekaran tidak dapat di lakukan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya.

Upaya pemekaran pekon dipandang sebagai terobosan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Pemekaran desa juga bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentan kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Melalui pemekaran pekon ini di harapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan yang bisa memajukan desanya masing-masing dan pemerintah pusat di

¹² Inu Kencana Syafii, Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012). 112.

harapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah atau terjun langsung dalam memantau kegiatan di setiap pekon.¹³

Desa secara etimologi berasal dari kata “*Swadesi*” bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Kata desa tersebut dalam bahasa jawa kemudian dipelintir menjadi “*Ndeso*” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “*udik*” atau “*pedalaman*” atau yang punya sifat “*kampungan*”. Pemahaman ini sama persis dengan arti kata “*kampung*”, yakni kolot, kuno, lama, Tradisional. Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang belanda anggota *Raad Van Indie* pada masa penjajahan colonial inggris yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negara asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan Norma, serta memiliki batasan yang jelas.¹⁴

Percepatan pembangunan adalah, menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tingkat pertumbuhan kecepatan. Upaya sadar yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah agar terciptanya pemerataan pembangunan di setiap daerah-daerah terpencil.¹⁵

Pemerataan pembangunan, menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, pembuatan pemerataan : pembangunan bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pendapatan bagi warga negara kita agar tercapainya pemerataan pembangunan di setiap desa.¹⁶

Pelayanan Masyarakat menjadi bagian yang penting diperhatikan dalam pembangunan otonomi, karena selain sesuai dengan dasar reformasi bidang pemerintahan, demikian pula berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi Masyarakat. Pelayanan Masyarakat

¹³ *Ibid.* 7

¹⁴ Zuhriani, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Anugrah Utama Raharja, 2017) 1-3

¹⁵ *Ibid.* 260

¹⁶ *Ibid.* 1147

yang baik merupakan hal wajib dipenuhi pada setiap organisasi kerja baik Pemerintah maupun swasta. Pelayanan Masyarakat yang maksimal tercermin dari sumberdaya yang mumpuni untuk mengerjakan dan

Pemekaran pekon adalah pemecahan atau pemisahan dari satu desa menjadi dua desa. pemekaran pekon prinsipnya adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah baik dari segi, kehidupan demokrasi, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban serta pemerataan pembangunan. Pemekaran pekon ialah upaya untuk meningkatkan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor,memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan perkembangan wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang pemekaran desa dan penataan desa.

Pemekaran pekon berdampak pada percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Adanya pemekaran pekon tersebut sangat di perlukan karena untuk meningkatkan pembangunan daerah serta percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Pekon Bandar Jaya itu sendiri.

Pemerataan pembangunan adalah merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah, karena dengan adanya pemertaan pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat merata, pertumbuhan ekonomi yang merata di buktikan dengan minimnya kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pelayanan masyarakat adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh pelayanan Masyarakat disetiap institusi tertentu.

Pada tahun 2009 dilakukan suatu pemekaran pekon dari satu pekon menjad 2 pekon yaitu pekon induk Negeri Ratu Kecamatan Ngaras dan pekon pecahannya yaitu pekon Bandar Jaya.

Dilakukannya pemekaran pekon saat itu karena masyarakat desa Bandar Jaya ingin mengurus sendiri desanya, karena sudah puluhan tahun pekon Bandar Jaya tidak ada kemajuan sedikitpun dalam arti masih banyak kekurangan baik dari segi pembangunan dari pelayanan terhadap masyarakat, maka dari itu masyarakat Bandar Jaya menginginkan suatu pemekaran agar pemerataan pembangunan dan pelayanan merata seperti pekon - pekon yang lain. pekon Bandar jaya saat itu memiliki luas wilayah 452Ha dan memiliki 2 pemangku yaitu pemangku Bandar Jaya dan Padang Dalam dan memiliki jumlah penduduk 673 jiwa.

Berdasarkan data di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut dengan judul **“Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Siyash (Studi di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang di bahas adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

1. Tuntutan masyarakat yang kuat untuk memisahkan diri dari pekon induk untuk mengurus sendiri daerahnya agar tercapainya suatu tujuan percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang maksimal.
2. Untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dan mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Dampak Pemekaran pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat
4. Dampak Pemekaran pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat Di Tinjau Dari Fiqih Siyash Di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah tentang Dampak Pemekaran pekon Terhadap Percepatan Pemerataan

Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Tinjau dari Fiqih Siyasah di pekan Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan Proposal Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Dampak Pemekaran pekan Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di pekan Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Dampak Pemekaran pekan Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di pekan Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak pemekaran pekan bandar jaya terhadap percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tinjau dari Fiqih Siyasah studi kasus pekan Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap dampak pemekaran pekan terhadap percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Tioritis yaitu dapat memperkaya khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menembah wawasan ilmu pengetahuan tentang Dampak Pemekaran pekan Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat serta dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lanjutan.
2. Manfaat praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis dalam memenuhi tugas skripsi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka yang terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang akan dipakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal yang diteliti dan yang belum diteliti, sehingga tidak terjadi Masyarakatasi atau plagiat penelitian.

1. Nurnovianah, “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi Di Desa Sori Sakalo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)”
Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dampak pemekaran Desa Sori Sakalo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan memberikan dampak yang Positif dan Sangat di rasakan perbedaan dari yang sebelumnya.
2. Lestiawati, “Pengaruh Pemekaran Desa Di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
Dapat di tarik kesimpulan dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Di Desa Lintik Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat ini sangat berdampak positif bagi masyarakat Desa Lintik setelah dilakukan pemekaran.
3. Takwa, “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Masyarakat Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019).
Dapat dilihat dari judul dan permasalahannya bahwa dampak pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Masyarakat di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima ini mengalami peningkatan pasca dilakukannya pemekaran desa atau terjadinya suatu pemecahan desa satu menjadi dua bagian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa sangat berdampak positif terhadap pelayanan public dan pemerataan pembangunan yang terstruktur.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat di artikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷ Komponen-komponen yang akan ditempuh dalam menggali dan menganalisa data untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif (field reserch) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁸ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Tinjau dari Fiqih Siyasah.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu pengumpulan data yang diperoleh melalui seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil dokumentasi, hasil survey, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini akan dijelaskan Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat. maka dalam penelitian ini, peneliti hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek hasil penelitian tanpa menarik kesimpulan umum kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan.

2. Sumber Data

Sumbar data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan sumber

¹⁷ Sugyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bambang: Alfabeta. 2007), 3

¹⁸ Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta, Bumi aksara, 2006), 5

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau buku-buku hasil pemikiran, baik menganalisa, merespon, atau mengkritisi.¹⁹

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulis. Data primer diambil dari wawancara. Wawancara dilakukan guna memperoleh data secara langsung dengan cara mewawancarai narasumber sebagai berikut:

- 1) Kepala pekon Bandar Jaya dan para stap serta prangkat pekon
- 2) Masyarakat pekon Bandar Jaya

b. Data Skunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini. Data skunder diperoleh dari data primer yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang mendukung data primer yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan ditambah bahan hukum tersier berupa artikel dan website.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sejumlah manusia, benda-benda, gejala, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, ketua lembaga himpunan pemekonan (LHP), aparatur desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemeuda, yaitu berjumlah 9 orang yang terdiri dari 1 kepala desa, 1 ketua lembaga himpunan pemekonan, 2 aparatur desa, 2 tokoh masyarakat, 1 tokoh agama, dan 2 tokoh pemuda. Sedangkan sampel adalah

¹⁹ Sugiono, *Metode penelitian Teori-teori Penelitian edisi revisi*, (Jakarta rinek cipta, 2016, 25

mengambil semua populasi karena populasi dalam penelitian ini tidak mencapai 100 orang, oleh karena itu penelitian ini penelitian populasi.

4. Instrumen Penelitian

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Secara tidak sederhana wawancara dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁰ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara struktur (tertulis) yaitu dengan menulis terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Dalam hal ini dimaksudkan agar pertanyaan lebih terarah dan fokus kepada tujuan yang dimaksud dan tidak melebar kepada pembahasan yang lain. Selain ini digunakan juga sebagai patokan umum yang dapat dikembangkan peneliti pada pertanyaan yang muncul ketika wawancara berlangsung.²¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat yang dibuat oleh manusia. Dokumentasi yang dimaksud adalah segala sesuatu catatan baik berbentuk catatan kertas ataupun elektronik yang dapat dijadikan bukti dalam sebuah penelitian.²²

²⁰ A. Muri Yusup, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. 305

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),.203

²² Samiaji Santoso, *Penelitian Kualitatif dasar-dasar esidi 2*, (Jakarta. Indeks, 2003), 65

5. Teknik Analisis Data

Menurut pendapat Saidel dalam buku metode penelitian kualitatif (Moleong), analisis data yaitu adalah upaya untuk menghasilkan catatan lapangan dengan diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, mengumumipulkan, memilah-milih, mengklarifikasikan, mengintensitaskan, mmembuat iktisar dan membua indeksinya, dan berfikir dengan jalan membuar agar kategori data itu mempunyai makna mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.²³ Jadi analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, dan mengkatagorikan sumbar data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan dan dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan proses penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci untuk dilakukan penyederhanaan data memfiler data-data yang dicatat peneliti, dan peroses berlangsungnya selama pelaksanaan penelitian bahkan belum melakukan pengumpulan data untuk dikatakan kembali agar tidak ada kekeliruan dalam catatan yang sudah dicatat.
- b. Penyajian data yaitu data yang dikelompokkan untuk menghasilkan informasi yang kemungkinan akan menjadi kesimpulan dari penelitaian yang dilakukan. Pada bagian

²³ Lexy J Meleong. *Metode penelitian kualitatif edisi trevisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014). 248

ini data yang disajikan telah di sederhanakan dan adanya reduksi data serta gambaran secara menyeluruh mengenai kesimpulan yang di ambil sehingga tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah di pahami.

- c. Verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data dengan ditemukannya bukti-bukti valid yang kuat dan diolah pada pengumpulan data berikutnya saat berlangsungnya dilapangan penelitian. Selama berjalannya penelitian dilapangan proses pengumpulan data atau berupa temuan deskripsi atau gambaran suatu objek dan mencari fakta yang ada masih bersifat sementara. Dalam tahap untuk menarik kesimpulan dari kategori data yang telah direduksi dan disajikan selanjutnya menuju kesimpulan akhir penelitian.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proosal ini meliputi:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang uraian penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitiann terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi teori tentang berfokus pada Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Tinjau Dari Fiqih Siyash di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

Bab III Deskripsi Penelitian

Bab ini berisi tentang uraian dari, gambaran umum lokasi penelitain, penyajian hasil wawancara dan fakta, serta temuan penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian

Pada Bab ini berisi uraian tentang Analisis Data Penelitian dan Temuan Penelitian

²⁴ *Ibid.* 246-253

Bab V Penutup

Bab ini berisikan tentang simpulan dan rekomendasi dan rekomendasi yang berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan terhadap data yang telah di dapatkan maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa. Dampak pemekaran pekon terhadap pembanguna infrastruktur di pekon Bandar jaya memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Pemekaran mendukung perbaikan jalan pekon yang sebelumnya rusak, meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan efisiensi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Kemudian Pendirian Kantor Pekon, pemerintahan pekon dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan adanya kantor pekon yang menjadi pusat pelayanan masyarakat dan pusat kegiatan pemerintahan. selain itu Pos Kesehatan Pekon (Poskesdes) dengan pembangunan pos kesehatan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung peningkatan sumber daya manusia melalui aspek kesehatan. Selanjutnya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau Saluran Irigasi, yang berdampak pada dukungan infrastruktur pertanian seperti TPT atau saluran irigasi mempermudah perawatan tanaman pertanian, meningkatkan produksi, dan mendukung kesejahteraan petani. Kemudian pembangunan Jalan Penghubung dan Kios Pasar, pembangunan jalan penghubung memfasilitasi akses produksi dan distribusi pertanian, sedangkan kios pasar memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha dan pemasaran hasil produksi.

Dengan demikian, pemekaran pekon tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang berkesinambungan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyash.

B. Rekomendasi

Dalam kerangka fiqih siyasah, prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan Masyarakat harus diterapkan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan ketaatan pada prosedur sambil memberikan penjelasan dan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Pentingnya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan pelayanan yang baik, merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kualitas layanan dan manajemen fasilitas Masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Ramburambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup 2007
- A. Tabrani Rusyan. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa* Jakarta: Bumi Aksara, 2018
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta :PT.Rineka Cipta, 1993
- Affan Ghaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009
- Aw. Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2013
- Djohan Djohermansyah, *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal*, Jakarta: Bumi Aksa, 1990
- Fakhruddin Arrazy, *Mafâtiḥulghaib*, (Maktabah Syamilah), juz v, h. 466 dan Ibrahim bin Umar al Biqâ'i, *Nadḥmu al durar fi tanasub al ayât wa al suwar*, (Maktabah Syamilah), juz II
- Haeruman. *Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah*, Jakarta: Prisma No. Khusus 25 Tahun 1971-1996
- Haw. Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta: Rajagrafindo persada, 2004
- Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi aksara, 2006
- Ibn Manzḥur, *Lisan al-„Arab Jilid 6*, Bierut : Dar al-Shadir, 1986.
- Ibnu Taimiyah, *Siyasaḥ Syar“iyyah*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005
- Imam al-Mawardi, *Aḥkam Sulḥaniyyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2020

Ibnu Kencana Syafii, Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012

Kuncoro Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta : Rajawali Pers, 2014

Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta, Rajawali Pers, 2014

Lexy J Meleong. *Metode penelitian kualitatif edisi trevisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014

Pemerintah RI, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Jakarta : Pemerintah, 2014

Samiaji Santoso, *Penelitian Kualitatif dasar-dasar esidi 2*, Jakarta. Indeks, 2003

Soejatmiko, " *Problems And Prospects For Development In Indonesia*", *Asia*. No.5, Oktober 1972

Sugiono, *Metode penelitian Teori-teori Penelitian edisi revisi*, Jakarta rinek cipta: 2016

Suharno dan Retnoningsuh, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya. 243

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993

Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, Anugrah Utama Raharja, 2017

Ali Abdul Wakhid, *Reformasi Pelayanan Masyarakat Di Indonesia*, Vol. 01 No. 14 2017, diakses 13 Februari 2021 Pukul 15.10 WIB

Bambang Sancoko, *Pengaruh Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat*, Vol. 17 No. 1 2013

Ida Hayu Dwimawanti, “*Kualitas Pelayanan Masyarakat*”, Vol. 1, No.1 Januari 2004, diakses 20 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB

<http://regional.kompas.com/read/2016/12/19/17464691/korupsi.seorang.kepala.desa.di.buton.jadi.tersangka,diMasyarakatasikan.pada.tanggal.19.Desember.2016>, diakses pada tanggal 12 maret 2021, pukul 13.06 WIB\

http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-02/samugyo-ibnu-redjo.pdf/pdf/samugyo-ibnu-redjo.pdf di akses pada tanggal 26 juli 2021

http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-02/samugyo-ibnu-redjo.pdf/pdf/samugyo-ibnu-redjo.pdf di akses pada tanggal 26 juli 2021

<http://rachmatdwimulya.blogspot.co.id/2014/09/konsep-pemerataan-pembangunan-daerah.html> di akses pada taggal 26 juli 2021.

Mohammad Khozin, “*Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan*”, Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 1 No.1 Agustus 2010 diakses 09 Desember 2021 pukul 20.00 WIB

Muhammad Abduh, *ushul al-Idariyah, Asy-Sayariyah*, Bayt Ats-Tsafiqoh, 2003

Muhanmmad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risâlah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, Beirut: Dar el Fikr, tt

Neneng Siti Maryam, “*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Masyarakat*”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VI No. 1 Juni 2016 diakses 20 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022)

Wahyu Abdul Jafar, Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-qur'an Dan Hadist, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol 6, No 2.

Wahyu Abdul Jafar, Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-qur'an Dan Hadist, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Iskam*, Vol 6, No 2. ss

Widya Kurniati Mohi, Irmanovika Mahmud, Kualitas Pelayanan Masyarakat di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Ilmu Adaministerasi Masyarakat*, Vol 6, NO 2, 2018.

